

SKRIPSI
POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA HULO KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE



DISUSUN OLEH:

Ayustina

(E041181014)

DEPARTEMEN ILMU POLITK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA HULO KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu politik
pada departemen ilmu politik
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

**OLEH
AYUSTINA
E041181014**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA HULO KECEMATAN KAHU KABUPATEN BONE

Disusun dan Diajukan Oleh :

AYUSTINA

E041181014

Telah dipertahankan di hadapan panitia penguji ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pada tanggal 28 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Andi Naharuddin, S.IP, M.Si
NIP. 197311222002121001



Haryanto, S.IP, M.A
NIP.198610082019031009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**POLITIK KEKERABATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA HULO KECEMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

Disusun dan Diajukan Oleh :

AYUSTINA

E041181014

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si



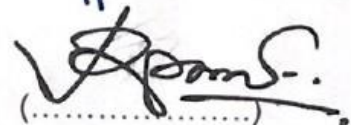
Sekretaris : Haryanto, S.IP., M.A.



Anggota : Dr. Ariana Yunus, M.Si



Anggota : Dr. Muh. Imran, S.Ip, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ayustina

NIM : E041181014

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang Pendidikan : S1

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone"** adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya orang lain. Tidak ada bagian yang memuat duplikasi dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Atas pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Makassar, 15 April 2022


Ayustina

ABSTRAK

AYUSTINA. E041181014. Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Di bawah bimbingan Andi Naharuddin dan Haryanto

Politik Kekerabatan merupakan alat yang tepat yang mampu membuat suatu kekuasaan yang kuat. Politik kekerabatan dapat menjadi sesuatu yang dapat mempertahankan kekuasaan, politik kekerabatan dapat dianggap mampu membentuk suatu perubahan dalam suatu lingkup desa karena masyarakat menganggap kerabat yang dipilihnya mampu membawa perubahan yang baik yang memiliki kemampuan serta dedikasi yang tinggi. Berdasarkan itu penelitian ini memfokuskan pada Bagaimana Eksistensi Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo, Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo, Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Penelitian ini di lakukan di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, studi pustaka serta observasi.

Hasil penelitian ini, yaitu politik kekerabatan sangat berpengaruh besar terhadap kemenangan dalam pemilihan kepala desa. Politik kekerabatan yang terjadi di Desa Hulo pada saat pemilihan kepala desa mampu membawa bapak Hasim menjadi kepala Desa. Besarnya peran penting keluarga serta kuatnya hubungan relasi yang di lakukan yang menjadikan bapak Hasim menang dalam pemilihan kepala Desa. Keluarga memiliki peranan yang sangat kuat, karena di dalam suatu Desa hubungan kekeluargaan masih sangat terjalin begitu kuat dan sangat bersatu.

Kata Kunci: Politik Kekerabatan, Pemilihan Kepala Desa.

ABSTRACT

AYUSTINA. E041181014. Kinship Politics in the Election of Village Heads in Hulo Village, Kahu District, Bone Regency. Under the guidance of Andi Naharuddin and Haryanto

Kinship politics is the right tool that can create a strong power. Kinship politics can be something that can maintain power, kinship politics can be considered capable of forming a change in a village scope because the community considers their chosen relatives to be able to bring about good changes who have high abilities and dedication. Based on that, this research focuses on how the existence of kinship politics in the election of the village head in Hulo village, Kahu sub-district, Bone district.

The purpose of this study was to determine the existence of kinship politics in the village head election in Hulo Village, Kahu District, Bone Regency. This research was conducted in Hulo Village, Kahu District, Bone Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive research type. Using in-depth interview data collection techniques, literature study and observation.

The results of this study, namely kinship politics has a big influence on winning in the village head election. The kinship politics that occurred in Hulo Village at the time of the village head election was able to bring Mr. Hasim to be the village head. The magnitude of the important role of the family and the strength of the relationships that made Mr. Hasim won in the village head election. The family has a very strong role, because in a village family relations are still very strong and very united.

Keywords: Kinship Politics, Village Head Election.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karunia serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”**. Shalawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, yang menjadi suri tauladan dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa sarjana (S1), untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang menyertai perjalanan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam pendahuluan ini, izinkan penulis untuk

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada dua mukjizat yang tuhan kirimkan kepada penulis yaitu kedua orang tua tercinta Bapak Bakri dan Ibu Syamsiah yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis. Bapak dan ibuku tersayang, sungguh doa kalianlah yang menginspirasi penulis untuk terus berkarya dan melangkah hingga sejauh ini. Kepada saudari penulis Hasnita yang terus memberikan dukungannya. Dan seluruh keluarga besar Addu dan keluarga besar Lembang yang selalu mendoakan dan membantu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si. selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan Bapak Haryanto, S.IP, M.A. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dr. Suparman Abdullah, M.Si** dan **Dr. Hasrullah, M.Si** selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan urusan akademik serta kemahasiswaan.
4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si,**

Ibu Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh **Staf Akademik Departemen Ilmu Politik** yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
8. Kepada teman-teman **Ilmu Politik 2018** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Kepada saudara saudariku **Revolusi18**. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
10. Kepada teman-teman **KKN BONE 7** terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, waktu, kenangan selama KKN dan telah berbagi pengalaman dan ilmu.
11. Kepada saudari-sudari terbaik sepanjang perkuliahan **Azkie Aziza, Sri Widayawati Ahmad, Fitriani, Sri Ratna Dewi, Nurul Mutya**

Yunus, Selviana, Indah sari, salmi, vina karlina yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk direpotkan, selalu menyajikan bahan untuk tertawa bersama yang mengajarkan tentang makna kebersamaan dan perjuangan.

12. Kepada **Selviana, Rismayanti, Nurfadhila Indriyani, Sinta Mursalim** dan **Musfira Haedar** sahabat masa kecil, hingga kini dan nanti yang memberi banyak pengalaman, pembelajaran dan menjadi keluarga kedua setelah keluarga kandung. Dimana keseruan, suka-duka dari kecil sampai saat ini yang dilewati bersama, saling membagi pengalaman dan ilmu bersama.

13. Kepada **Faisal** yang telah memberi semangat, dukungan dan menjadi pendengar serta penghibur disaat penulis terpuruk walaupun terkadang menyebalkan, Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan dan turut memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi.

14. Untuk semua informan, terima kasih atas segala waktu yang diluangkan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Akhirnya penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan perhatian, dukungan, bimbingan dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 15 April 2022

Ayustina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Penelitian Terdahulu	12
2.2. Politik Kekerabatan	14
2.3. Pemilihan Kepala Desa	20
2.4. Kerangka Pikir	24
2.5. Skema Pikir	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Tipe Penelitian	27
3.2. Dasar Penelitian	27
3.3. Lokasi Penelitian	28
3.4. Jenis Dan Sumber Data	28
3.5. Narasumber/Informan Penelitian	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
4.1. Gambaran Umum Desa Hulo	34
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
5.1. Dinamika Pemilihan Kepala Desa	43
5.2. Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa	46
5.2.1. Kekerabatan Dalam Pemenangan Pilkades	47
5.2.2. Hubungan Kekeluargaan	52
5.2.3. Hubungan Relasi	64
BAB VI PENUTUP	71
6.1. Kesimpulan	71
6.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Hulo.....	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hulo	38

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sejarah Desa Hulo	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Hulo	38
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan	39
Tabel 4.4 Mata Pencaharian	40
Tabel 4.5 Kepemilikan Ternak Berdasarkan Kepala Keluarga	40
Tabel 4.6 Daftar Perangkat Desa Hulo	42
Tabel 4.7 Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Hulo	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem Pemerintahan Indonesia, desa merupakan bagian pemerintahan paling dasar. Desa merupakan aset dalam negara sehingga pengelolannya harus sebisa mungkin menghasilkan peningkatan kualitas, namun dalam realitas terjadi dilapangan sering terjadi kesalahan kewenangan dalam implementasi hal tersebut. Tidak hanya disitu saja anomali ataupun ketimpangan juga banyak dilakukan oleh beberapa Aparatur desa, bahkan terjadi *distorsi* dalam menyelenggarakan kewenangan dan tugas dalam pemimpin desa.

Fenomena majunya Calon Kepala Desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya, bahkan banyak dari warganya yang merupakan kerabat. Berbicara tentang Pemilihan Pemimpin Desa atau Pilkades adalah suatu Pemilihan Kepala Desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama calon terpilih sebagai Kepala Desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga setempat

Jika berbicara mengenai politik kekerabatan (politik dinasti) sebenarnya telah ada dan telah berkembang di Indonesia pada zaman

kepemimpinan Soekarno dilanjutkan oleh putrinya sekaligus mantan presiden yaitu Megawati Soekarno Putri yang diturunkan lagi kepada putrinya Puan Maharani.

Politik kekerabatan memang dapat dijumpai di hampir semua negara. Di Amerika Serikat misalnya, keluarga Kennedy masih dianggap sebagai kekuatan politik berpengaruh atau dihormati, baik di Massachusset maupun ditingkat negara federal. Demikian pula dengan keluarga Tafts dan Daley di Ohio dan Chicago. Saat ini Menlu Amerika, Hillary Clinton adalah istri dari mantan presiden Bill Clinton. Meski keluarga-keluarga ini memiliki pengaruh, prestise, atau kekuatan finansial, *frinsip equality of opportunity* benar-benar dihormati dan dijalankan sehingga kemunculan dari tokoh-tokoh dari keluarga politik ini tidak menimbulkan resistensi yang luas dikalangan pemilih yang rasional di Amerika.

Negara dijalankan oleh segelintir elit dari beberapa keluarga, klaen, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan. Dengan bertumbuhnya politik kekerabatan, maka peluang juga akan semakin terbuka untuk melakukan dinasti politik dan juga akan berpengaruh terhadap kekayaan, penguasaan terhadap wilayah, maupun kontrol ekonomi yang nantinya akan memenangkan kontestasi

politik dibandingkan yang lain yang sumber dayanya masih terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan harapan.

Akar terbentuknya politik kekerabatan adalah adanya budaya politik patrimonialisme, dan tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Dalam praktiknya budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan.

Berbicara tentang Pemilihan Pemimpin Desa atau Pilkades adalah suatu Pemilihan Kepala Desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama calon terpilih sebagai Kepala Desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga setempat.¹

Pilkades merupakan salah satu kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat desa. Pilkades di Indonesia saat ini masih penuh dengan *ironisme*. Di satu sisi, rakyat yang sangat apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipatif masyarakat dalam Pilkades menurun.

¹ Ananda Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Alumni, 2004

Apatis masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik.

Mereka adalah para elit desa yang ingin melanggengkan kekayaan dan kekuasaan agar tetap jatuh kepada garis keluarga. Sehingga fakta menunjukkan keberadaan Calon Kepala Desa masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari golongan desa.

Kekuasaan, modal materi, dan modal sosial pada dasarnya sebagai alat untuk meraih kemenangan. Di sini Calon Kepala Desa memainkan sumber kekuasaan untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Dalam prakteknya Calon Kepala Desa membutuhkan sebuah cara yang efektif. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang seperti membuat rancangan strategi sampai pada memanfaatkan ikatan keluarga sebagai tim sukses untuk melanggengkan kekuasaan, sumber kekuasaan itu diharapkan dapat menarik dukungan yang lebih besar pula.

Dalam kajian Antropologi politik kekerabatan, politik kekerabatan sanggup dan bertahan menghadapi evolusi politik. Antropologi mempercayai politik kekerabatan akan menjadi dominan. Pada dasarnya budaya politik kekerabatan memunculkan banyak pro dan kontra. Sebagian ada yang menganggap baik karena kestabilan politik terjaga dan sebagian pula ada yang menganggap bahwa politik

kekerabatan hanya alat yang digunakan para pejabat untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain itu politik kekerabatan mempersempit kesempatan bagi orang lain yang berpartisipasi lebih untuk menjadi Kepala Daerah karena biasanya calon pemimpin dari politik kekerabatan lebih banyak dukungan.

Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye, pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa dan faktor-faktor tertentu yang membuat calon terpilih, seperti keluarga. Pertarungan antar elit desa dalam pemilihan kepala desa mengandalkan kekuatan politik mereka sendiri untuk meraih dukungan masyarakat desa. Calon kepala desa harus memiliki berbagai keunggulan sumber daya atau kekuatan agar para pemilih yakin bahwa mereka layak menjadi kepala desa. Bagi keluarganya tantangan menjadi kompleks, sebab selain harus memiliki sumber daya atau kekuatan, masa kepemimpinan sebelumnya biasanya dijadikan tolak ukur apakah mereka masih layak dipilih atau tidak.

Permasalahan yang terjadi terkait dengan politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa, di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone adalah di mana dalam sistem pemilihan kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan. Para calon-calon kepala desa

melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan kekuasaan.

Ibu Farida menjabat sebagai kepala Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sebanyak 3 Periode dari Tahun 2004-2021. Pada periode pertama, terdapat 3 calon yakni Andi Mappigau, Tassakka dan Farida. Pada periode pertama jumlah suara yang diperoleh ibu Farida sebanyak 550. Pada periode ke dua, terdapat 4 calon yakni Farida, Ansar, Tassakka, dan Ambo Tuwo. Suara yang diperoleh ibu Farida sebanyak 720. Dan pada Pada periode ke tiga terdapat lima calon, yakni Farida, Ansar, Tassakka, Ambo Tuwo dan Kamridah, dengan jumlah suara yang diperoleh ibu Farida sebanyak 432.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ibu Farida selalu unggul dalam setiap pemilihan selama 3 tahun berturut-turut. Meskipun pada periode ke 3, suaranya mengalami penurunan. Tetapi ibu farida masih tetap memimpin. Penyebab suara ibu Farida pada periode ke 3 menurun karena pada periode ke 3 calon kepala desa sebanyak 5 orang yang secara otomatis suara masyarakat terbagi menjadi 5.

Pada pemilihan kepala Desa, Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yang dilaksanakan pada 18 November 2021, calon yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa sebanyak 5 calon. Calon tersebut bernama Syarifuddin, Hasim, Kamrida, Ambo Tuwo, dan Alimuddin. Suara tertinggi di menangkan oleh calon No 2 pak Hasim

yang merupakan suami dari Farida yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa 3 periode secara berturut-berturut.

Peran serta politik kekerabatan didesa Hulo masi sangat menunjang dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa, karena kepala desa yang terpilih masi memiliki hubungan status perkawinan serta hubungan marga, sehingga memperkecil kesempatan kepada calon lain untuk menang.

Pemilihan yang terjadi pada tgl 18 November 2021, di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dengan jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap sebanyak 1.796 dan pemilih yang hadir dalam pemilihan sebanyak 1.513 dan sebanyak 283 masyarakat yang terdaftar yang tidak ikut hadir dalam pemilihan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sah, masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut: Syarifuddin memperoleh suarah 344, Hasim memperoleh suara 428, Kamrida, memperoleh suara 394, Ambo Tuwo memperoleh suara sebanyak 187 suara, dan Alimuddin memperoleh suara 156.

Dapat di lihat pada data tersebut, suara tertinggi di menangkan oleh Bapak Hasim dengan jumlah suara yakni 426. Dengan demikian dapat di katakan bahwa peran serta politik kekerabatan didesa Hulo masih sangat menunjang dalam memenangkan pemilihan Kepala Desa, karena kepala desa yang terpilih masih memiliki hubungan status

perkawinan serta hubungan marga, sehingga memperkecil kesempatan kepada calon lain untuk menang.

Alasan yang menjadi penunjang politik kekerabatan masih sangat berperang dalam pemilihan kepada desa di Desa Hulo, karena masyarakat menganggap selama kepemimpinan Ibu Farida banyak melakukan perubahan yang berdampak positif kepada perkembangan desa serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pada saat pencalonan dilanjutkan oleh suaminya masyarakat menganggap bahwa suami dari ibu Farida dapat serta mampu untuk melanjutkan apa yang selama ini telah dilakukan oleh Kepala desa sebelumnya.

Hal lain yang menjadi alasan mengapa masyarakat masih mempercayakan desanya di pimpin oleh bagian dari keluarga yang sebelumnya menjabat karena masyarakat melihat visi-misi, tujuan kepala desa sebelumnya mampu di lanjutkan oleh suaminya yang saat ini sedang menjabat. Visi misi serta tujuan yang ingin di capai adalah bagaimana mensejahterakan, memakmurkan, serta membangun desa agar masyarakat mampu hidup mandiri, sejahtera, serta mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara.

Melihat kepemimpinan Ibu Farida selama kurang lebih 3 periode mampu membawa Desa Hulo menjadi salah satu desa yang memiliki integritas yang tinggi dari segi kepemimpinan, pelayanan, serta

menjadi desa yang mampu menjadi role model bagi desa-desa yang lain karena di anggap mampu membangun desa yang mandiri, madani, serta mampu memberikan hal yang baik untuk masyarakatnya. Hal tersebutlah yang diyakini oleh masyarakat jika suami dari Ibu Farida mampu melanjutkan apa yang selama ini di bangun serta mampu memberikan yang terbaik untuk desa Hulo.

Selain dari pada itu, hal utama yang menjadi alasan mengapa Pak Hasim menang dalam pemilihan kepala desa, selain karena merupakan suami dari Ibu Farida yang sebelumnya menjabat selama 3 periode, karena masyarakat melihat pak Hasim adalah Pensiunan anggota Polisi yang mampu untuk memimpin desanya. Pak Hasim memiliki dedikasi yang baik, jenjang pendidikan yang baik, pak Hasim dikenal masyarakat sebagai tokoh masyarakat yang memiliki sifat rendah hati, peduli terhadap sesamanya serta selalu terlibat langsung dalam setiap kegiatan serta acara di desa. Selain itu, masyarakat melihat pak Hasim memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu membawa Desa Hulo menjadi desa yang mandiri, sejahtera, serta dapat memakmurkan kehidupan masyarakatnya.

Politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa, di desa Hulo terjalin begitu kental. Tidak dapat di pungkiri bahwa di desa Hulo yang menjadi kepala desa masih menjaling hubungan keluarga dengan mantan kepala desa sebelumnya. Calon kepala desa yang mencalonkan

diri menjadi kepala desa yang saat ini menjabat menjadi kepala desa masih merupakan bagian keluarga dari kepala desa sebelumnya. Hal tersebut terus terjadi setiap pemilihan kepala desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang **“Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini mengenai Bagaimana Eksistensi Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah,

1. untuk mengetahui pola Patron klien Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
2. untuk mengetahui pola Hubungan Kekeluargaan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
3. untuk mengetahui pola Hubungan Relasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang politik kekerabatan yang terjadi pada pemilihan kepala Desa
- b. Sebagai sumbangan pengetahuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik terkait tentang politik kekerabatan yang terjadi pada pemilihan kepala Desa

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti yang ingin meneliti terkait politik kekerabatan yang terjadi pada pemilihan kepala Desa
- b. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Salah satu cara penyusunan skripsi ini berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang berupa karya tulis terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Hal itu untuk menghindari penelitian berulang tentang politik kekerabatan yang terjadi pada pemilihan kepala Desa. Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian ini seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shem Iba, 2019 yang berjudul “Dinasti Politik Kekerabatan (Studi Kasus Di Kampung Meidodga Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak)” secara spesifik skripsi ini membahas tentang dinasti politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penelitian saya adalah dimana sama-sama membahas tentang politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian saya adalah dimana pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada dinasti politik

kekerabatan dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan penelitian saya berfokus kepada Eksistensi politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa.

Penelitian selanjutnya di tulis oleh Faisol, 2018 yang berjudul “Peran kekerabatan dalam pemenangan pemilihan kepala desa Bungurasih Tahun 2016” penelitian ini secara spesifik membahas tentang bagaimana peran penting kekerabatan dalam pemilihan kepala desa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah dimana sama-sama membahas tentang Peran penting kekerabatan dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan terdapat pada lokasi penelitian.

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Rini Anggriani Syukiri, 2021 yang berjudul “Garis keturunan dalam pemilihan kepala Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru” penelitian ini secara spesifik membahas tentang Kontestasi politik lokal dalam pilkades di Desa selama ini ikatan garis keturunan atau kekerabatan masih sangat kental. Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu dimana sama-sama membahas tentang politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu berfokus kepada tentang Kontestasi politik lokal dalam

pilkades di Desa selama ini ikatan garis keturunan atau kekerabatan sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus kepada Eksistensi politik kekerabatan dalam pemilihan kepala desa.

2.2. Politik Kekerabatan

Politik adalah aktivitas yang melalui masyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka.²

Politik kekerabatan menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Dengan menggunakan alat-alat kelengkapan demokrasi seperti partai politik, lembaga, dan institusi negara, serta media massa. Peralatan sistem demokrasi tersebut digunakan bukan untuk menopang sistem demokrasi melainkan memanipulasinya menjadi oligarki. Politik kekerabatan menjadi ruang perebutan kekuasaan dan penimbun kekayaan antara para oligarki.³

Politik kekerabatan kerap dinilai sebagai sesuatu yang bisa melanggengkan kekuasaan. Politik kekerabatan atau yang lebih dikenal dengan politik dinasti memang kerap terjadi dan bahkan terjadi disekitar

² Andrew Heywood. Politik. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2014

³ Harjanto, Perencanaan Pengajaran, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011

kita. Jadi arti dari politik kekerabatan itu sendiri adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatnya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan.

Politik kekerabatan semakin tampak menguat. Ini tidak terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan partai politik. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan jika kecenderungan ini semakin meluas. Negara dijalankan oleh segelintir elit dari beberapa keluarga, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karena sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan.

Dari konsep Caey, Hess, dan Kurt, kajian tentang politik kekerabatan lebih banyak menggunakan konsep dinasti politik, keluarga politik, maupun kekerabatan politik, namun skripsi ini menggunakan konsep politik kekerabatan. Konsep politik kekerabatan dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada aktifitas politik yang merekrut anggota kerabatnya dalam jabatan politik.

a. Tipe Politik Kekerabatan

Terdapat beberapa catatan mengenai fenomena politik kekerabatan yaitu, pertama; terdapat keinginan yang cukup kuat dari pertahana untuk mempertahankan kekuasaan dengan membentuk keluarga politik ditingkat lokal. Kedua; kecenderungan pembentukan politik kekerabatan ternyata didukung oleh partai-partai besar di lembaga perwakilan yang berarti juga memperoleh dukungan dari elit politik.

Dukungan partai-partai besar pada kandidat dari keluarga pertahana (yang bahkan bukan berasal dari kader partai) menunjukkan masih lemahnya partai politik sebagai instrumen demokrasi, yang lebih mengandalkan pada aspek popularitas kandidat.

b. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah sistem hubungan sosial yang timbul dari keturunan dan perkawinan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang lain. Sedangkan perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Sehubungan dengan menjalankan fungsinya, sistem kekerabatan ini terlihat pada lembaga keluarga. Terdapat tiga macam bentuk keluarga, yaitu keluarga inti, keluarga besar dan keluarga poligami. Untuk kepentingan bersama, beberapa keluarga berusaha menggabungkan diri, dasarnya antara lain satu keturunan mempunyai tujuan yang sama.

Sistem kekerabatan dalam praktik politik menurut Fortes dan Evans Prichart.⁴

1. Pertama, yang menunjukkan kepada masyarakat yang mempunyai kekuasaan terpusat, hirarki, administratif, lembaga hukum ditetapkan dengan jelas. Struktur, kelas dan perilaku politik menurut gambar teritorial. Struktur administratif berisikan struktur politik dan karenanya memiliki sebuah pemerintahan yang menyerupai negara. Dalam struktur kekuasaan tugas dan wewenang politik tertata dengan rapi mulai dari tingkat tertinggi sampai pada struktur kelompok yang paling kecil/ rendah.
2. Kedua, adalah sistem politik dengan struktur politik yang tidak mempunyai kekuasaan terpusat, mesin administratif atau pengadilan dengan kekuasaan untuk menjatuhkan tidak tertata dengan jelas, dimana dalam struktur politik tugas dan wewenang tidak tertata secara rapi sehingga kadang disebut masyarakat tak bernegara. Dalam masyarakat seperti ini garis keturunan dipergunakan sebagai kerangka satuan politik, sehingga perilaku politik terikat sangat kuat dengan dan tercakup oleh sistem pertalian keluarga.
3. Ketiga, adalah kelompok komunitas kecil yang keseluruhannya dipersatukan oleh ikatan kekeluargaan, kelompok masyarakat tersebut

⁴ Anggraeni, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Yogyakarta: Nuha Medika, 2013

terbentuk berupa gerombolan keluarga atau keluarga pengembara yang hidupnya kadang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan ketersediaan makanan, baik makanan untuk kebutuhan kelompok atau kebutuhan ternak.

c. Patron Klien

Teori ini hadir untuk menjelaskan bahwa dalam suatu interaksi sosial masing-masing aktor melakukan hubungan timbal balik. Hubungan ini dilakukan secara vertikal (satu aktor kedudukannya lebih tinggi) maupun secara horizontal (masing-masing aktor kedudukannya sama). Istilah Patron berasal dari bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh, sedangkan Klien berarti bawahan atau orang yang diperintah yang disuruh.⁵

Patron dan Klien berasal dari suatu model hubungan sosial yang berlangsung pada zaman Romawi Kuno. Seorang patronus adalah bangsawan yang memiliki sejumlah warga dari tingkat lebih rendah, yang disebut clients, yang berada dibawah perlindungannya.

Meski para klien secara hukum adalah orang bebas, mereka tidak sepenuhnya merdeka. Mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga pelindung mereka. Ikatan antara patron dan klien mereka

⁵ Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta; Bumi Aksara, 2011

bangun berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik yang biasanya bersifat turun temurun

Patron muncul sebagai individu yang memiliki kelebihan, kekayaan, atau kekuasaan, sedangkan klien hadir sebagai anggota masyarakat yang biasa yang tidak mempunyai kelebihan tersebut, sehingga hubungan tersebut dilandaskan oleh pertukaran kepentingan antar patron dan klien.

Hubungan patron-klien lebih merupakan hubungan pertukaran (*exchange relationship*) yaitu:⁶

1. Pertukaran hanya terjadi antar pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit.
2. Pertukaran antara dua macam, yang langsung (dalam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar)

Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan/penghargaan dan kepatuhan.

⁶ Philupus , Ng & Nurul Aini, *Sosiologi dan politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Selanjutnya Peter M. Blau menjelaskan ciri-ciri patron-klien, sebagai berikut:⁷

1. Adanya ketidak seimbangan status antara patron-klien.
2. Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan patron lebih tinggi dari klien.
3. Ketergantungan klien pada patron karena adanya pemberian barangbarang yang dibutuhkan klien dari patron yang menyebabkan adanya rasa utang budi pada patron.
4. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan.

2.3. Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Yang dilaksanakan bebas, umum dan adil yang selanjutnya juga di atur dalam undang- undang dan peraturan Menteri dalam negeri. Pemilihan kepala desa secara langsung diatur oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

⁷ ibid

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan (Permendagri Nomor 112 tahun 2014)

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan

Adapun tahapan pemilihan kepala desa adalah:

- a. Badan permusyawaratan desa memberitahukan kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- b. Badan permusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan kepala desa

Setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala desa maka ketua badan permusyawaratan desa (BPD) desa mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat kalau masa atau tahapan penjurangan calon kepala desa, jadi bagi penduduk desa yang berkeinginan menjadi calon kepala desa dipersilahkan untuk mendaftarkan dirinya kepada panitia pemilihan kepala desa.

Kemudian panitia pemilihan kepala desa menetapkan cara penjurangan bakal calon kepala desa, di mana tahap tersebut menurut pasal 11 (sebelas) peraturan daerah tersebut diatas menyatakan:

- a. Tahapan ini dikatakan tahap penjaringan dimana panitia menunggu serta mencari penduduk yang berkunjung menjadi calon kepala desa, masa penjaringan ini dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.
- b. Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menghasilkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- c. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari belum dapat dijamin bakal calon kepala desa sebanyak 3 orang, maka penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi.
- d. Dalam hal sampai dengan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) orang bakal calon kepala desa maka penjaringan bakal calon kepala desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa yang ditentukan berakhir maka panitia akan masuk kepada tahap penyaringan, di mana tahap penyaringan ini dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.

Kemudian tahap selanjutnya apabila bakal calon kepala desa telah berhasil diperoleh, maka dilakukan atau dilanjutkan kepada tahap seleksi atau penyaringan bakal calon kepala desa, seleksi tersebut dilakukan dengan cara melakukan ujian penyaringan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tersebut diatas, kemudian berdasarkan hasil penyaringan tersebut, maka akan diperoleh bakal

calon kepala desa sekurang- kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Setelah bakal calon telah ditetapkan, maka selanjutnya akan mengikuti tahap kampanye, sebagaimana menurut pasal 15 peraturan daerah Kabupaten Bone nomor 4 tahun 2007 tentang cara pencalonan, pemilihan pelantikan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat dan pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan
- b. Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme sistem dan waktu pelaksanaan kampanye
- c. Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari
- d. 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara masing-masing calon kepala desa yang mana pelaksanaan disebutkan didalam pasal 19 (sembilan belas) peraturan daerah kabupaten Bone nomor 4 tahun 2007 sebagai berikut: Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil.

2.4. Kerangka Pikir

Kekuasaan, modal materi, dan modal sosial pada dasarnya sebagai alat untuk meraih kemenangan. Disini Calon Kepala Desa memainkan sumber kekuasaan untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Dalam prakteknya Calon Kepala Desa membutuhkan sebuah cara yang efektif. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang seperti membuat rancangan strategi sampai pada memanfaatkan ikatan keluarga sebagai tim sukses untuk melanggengkan kekuasaan, sumber kekuasaan itu diharapkan dapat menarik dukungan yang lebih besar pula.

Fenomena majunya Calon Kepala Desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya, bahkan banyak dari warganya yang merupakan kerabat sebenarnya sangat ironis. Hal ini menunjukkan bahwa kursi Kepala Desa adalah jabatan yang menguntungkan, membawa berkah, dan bisa dijadikan sarana untuk mengumpulkan kekayaan serta melanggengkan kekuasaan untuk diturunkan kepada keluarga maupun kerabat sendiri.

2.5. Skema Pikir

